

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era perkembangan perekonomian yang fluktuatif sekarang ini, setiap negara terus berupaya mendorong atau meningkatkan perekonomiannya di taraf stabil dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan di suatu negara atau wilayah, karena mencerminkan peningkatan kapasitas produksi dan kesejahteraan masyarakatnya (Sultan *et al.*, 2023).

Proses yang menyebabkan peningkatan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara secara konsisten dalam jangka panjang disebut pertumbuhan ekonomi. Secara umum, pertumbuhan ekonomi diukur melalui peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Ini menunjukkan perubahan kuantitatif dalam output ekonomi setiap tahun, dengan tujuan meningkatkan pendapatan rata-rata per orang dan meningkatkan sistem kelembagaan (Fahrudin, 2024).

Menurut Masriah (2011), negara yang sedang membangun seperti Indonesia sangat mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang stabil karena mereka dapat melihat masalah ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, buta huruf, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penekanan yang lebih besar pada pendidikan dan kesehatan.

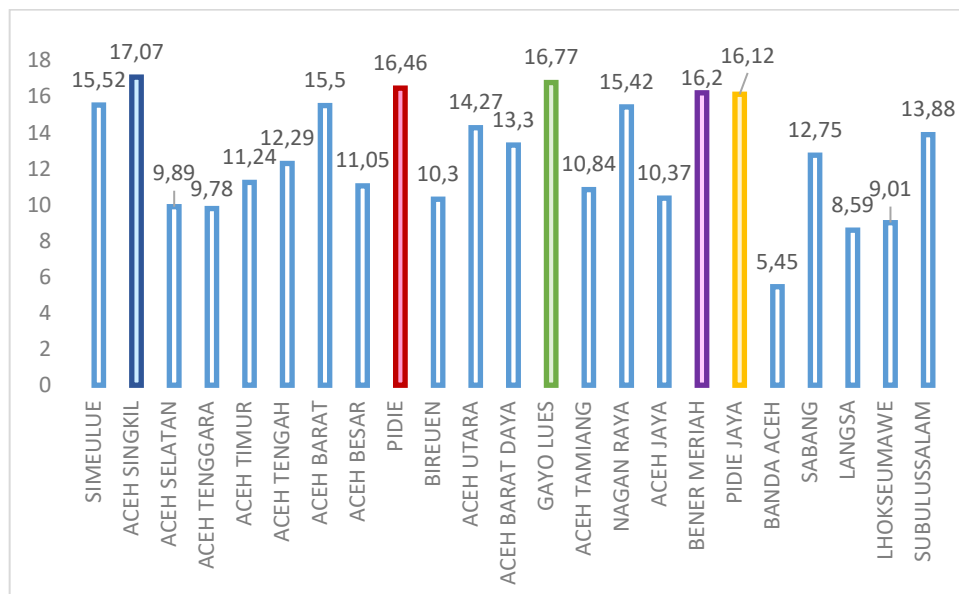
Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dapat memberikan gambaran kemajuan sosial. Pemerintah dapat mencapai pertumbuhan ekonomi

dengan cara pemerataan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah cenderung tinggi dan stabil setiap tahunnya, menandakan perekonomian masyarakat sejahtera, sementara resesi berakibat pada penurunan kemajuan ekonomi (Ibrahim, 2013).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,05%, namun angka ini tidak merata di seluruh wilayah, terutama di daerah-daerah terpencil seperti Provinsi Aceh yang masih menghadapi tantangan pasca-konflik dan bencana alam (BPS, 2023). Provinsi Aceh, memiliki potensi sumber daya alam yang besar, namun pertumbuhan ekonominya sering kali terhambat oleh faktor eksternal dan internal. Salah satu faktor penghambatnya juga karena kemiskinan di Provinsi Aceh masih sangat tinggi. Berdasarkan data BPS pada September 2024, Provinsi Aceh berada di posisi pertama sebagai provinsi termiskin di pulau Sumatera. Meskipun Aceh termasuk status otonomi khusus dan dukungan fiskal dari pemerintah pusat, kenyataannya tingkat kesejahteraan masyarakat belum merata. Kondisi ini mencerminkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Aceh masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks.

Data Badan Pusat Statistik (2024) menunjukkan bahwa meskipun angka kemiskinan mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, Aceh masih termasuk provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Fenomena ini terlihat jelas pada daerah-daerah terpencil. Selain itu, kemiskinan di Aceh juga didominasi oleh wilayah perdesaan, di mana sebagian besar masyarakat hidup dengan keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Pola ini menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan antar

wilayah serta keterbatasan akses ekonomi yang menyebabkan sebagian masyarakat sulit keluar dari kondisi kemiskinan. Fenomena tersebut mencerminkan bahwa kemiskinan di Aceh bukan hanya persoalan jumlah penduduk miskin, tetapi juga berkaitan dengan distribusi pembangunan yang belum merata dan keterisolasian wilayah (World Bank, 2018). Berikut perkembangan kemiskinan di Provinsi Aceh berdasarkan Persentase penduduk miskin tahun 2025 pada gambar 1.1



Gambar 1.1 Persentase Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota Provinsi Aceh tahun 2025 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (2026)

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas 5 Kabupaten/Kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi yaitu kabupaten Aceh Singkil (17,07%), Pidie (16,46%), Gayo Lues (16,77%), Pidie Jaya (16,12%) dan Bener Meriah (16,02%). Permasalahan utama yang dihadapi adalah masih terbatasnya diversifikasi ekonomi, di mana struktur ekonomi Aceh cenderung bergantung pada sektor-sektor tertentu sehingga belum mampu menciptakan pertumbuhan yang merata di seluruh sektor. Kondisi ini menyebabkan rendahnya nilai tambah ekonomi dan mempersempit peluang penciptaan lapangan kerja yang lebih luas, sehingga berdampak pada masih

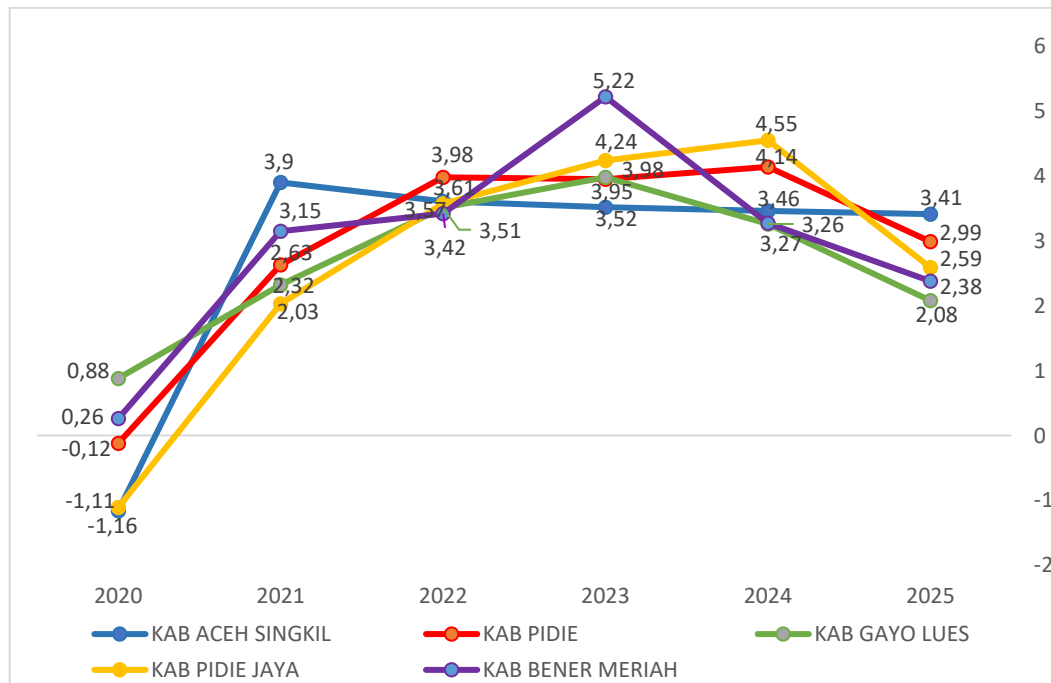
tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan di beberapa wilayah (Rizani, 2021).

Jika dilihat lebih dekat, kemiskinan di Aceh tidak tersebar secara merata, melainkan terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu. Beberapa wilayah seperti Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Gayo Lues, dan Kabupaten Bener Meriah menunjukkan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Fenomena ini mengindikasikan bahwa kemiskinan di Aceh memiliki pola spasial tertentu, di mana daerah-daerah dengan keterbatasan akses dan infrastruktur cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi (BPS Aceh, 2024).

Oleh karena itu, ketimpangan pembangunan antar wilayah di Aceh masih menjadi fenomena yang cukup menonjol, di mana beberapa daerah mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan daerah lainnya. Perbedaan ini dipengaruhi oleh variasi ketersediaan infrastruktur, akses terhadap pendidikan dan layanan publik, serta konsentrasi aktivitas ekonomi yang tidak merata. Akibatnya, manfaat pertumbuhan ekonomi belum dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat di Aceh (Samsulijar *et al.*, 2019).

Penelitian Fazil & Siregar, (2016) menekankan bahwa perbedaan sektor unggulan di masing-masing kabupaten, seperti dominasi sektor pertanian di Gayo Lues dan Aceh Singkil, turut mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi yang cenderung lebih lambat dibanding daerah dengan sektor industri atau jasa yang lebih berkembang. Sementara itu Nizar *et al.*, (2019) menemukan bahwa hasil pemekaran wilayah belum sepenuhnya mampu mendorong percepatan pembangunan ekonomi di beberapa daerah seperti Pidie jaya dan Bener Meriah. ketimpangan pertumbuhan antar wilayah ini juga telah terjadi dalam jangka

panjang. Berikut Gambar 1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi di lima kabupaten termiskin di Provinsi Aceh selama enam tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025.



Gambar 1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi di 5 Kabupaten/Kota termiskin Provinsi Aceh Tahun 2020-2025 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (2026)

Berdasarkan Gambar 1.2 terlihat bahwa pada tahun 2020 seluruh daerah mengalami kontraksi ekonomi akibat dari pandemi Covid-19, di mana pertumbuhan ekonomi di beberapa Kabupaten menurun menjadi negatif sebesar -1,16% di Aceh Singkil, -1,11% di Pidie Jaya dan -0,12% di Pidie, sementara Gayo Lues masih mencatat pertumbuhan positif sekitar 0,88% dan 0.26% di Bener Meriah. Memasuki tahun 2021 sampai 2023, pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren pemulihan dan peningkatan yang relatif konsisten di seluruh kabupaten. Pada Kabupaten Bener Meriah di tahun 2023 terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menyentuh angka 5,22% yang didorong oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, konsumsi non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRRT), dan

terutama pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi, yang menunjukkan adanya peningkatan aktivitas investasi dan pembangunan di daerah ini (BPS, 2024). Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi cenderung stabil, sementara Pidie dan Pidie Jaya masing-masing tumbuh 4,14% dan 4,55%, sementara kabupaten Aceh singkil berada pada kisaran 3,46%, Bener Meriah di 3,27% dan Gayo Lues di 3,26%. Terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 di kelima Kabupaten yaitu Aceh singkil di 3,41%, dan terendah di Gayo Lues mencapai 2,08%. Hal ini disebabkan oleh terjadinya bencana banjir yang menyebabkan melemahnya sektor pertanian dan perkebunan, serta turunnya daya beli masyarakat. Selain itu, perlambatan konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah ikut menekan aktivitas ekonomi daerah (BPS Aceh, 2025).

Dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi, maka belum sepenuhnya mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan, yang mengartikan bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah ini belum sepenuhnya bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat karena adanya ketimpangan distribusi pendapatan dan daya beli. Salah satu faktor yang memperkuat kondisi tersebut adalah inflasi, yang cenderung menurunkan daya beli masyarakat, terutama pada kelompok berpendapatan rendah, sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi menjadi tidak merata. Penelitian menunjukkan bahwa dinamika ekonomi seperti pertumbuhan dan perubahan harga (inflasi) dapat memperburuk ketimpangan distribusi pendapatan, karena keuntungan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh kelompok berpendapatan tinggi (Fakhrudin *et al.*, 2020).

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang umum dan berkelanjutan selama periode waktu tertentu. Inflasi yang tidak terkendali dapat mengganggu

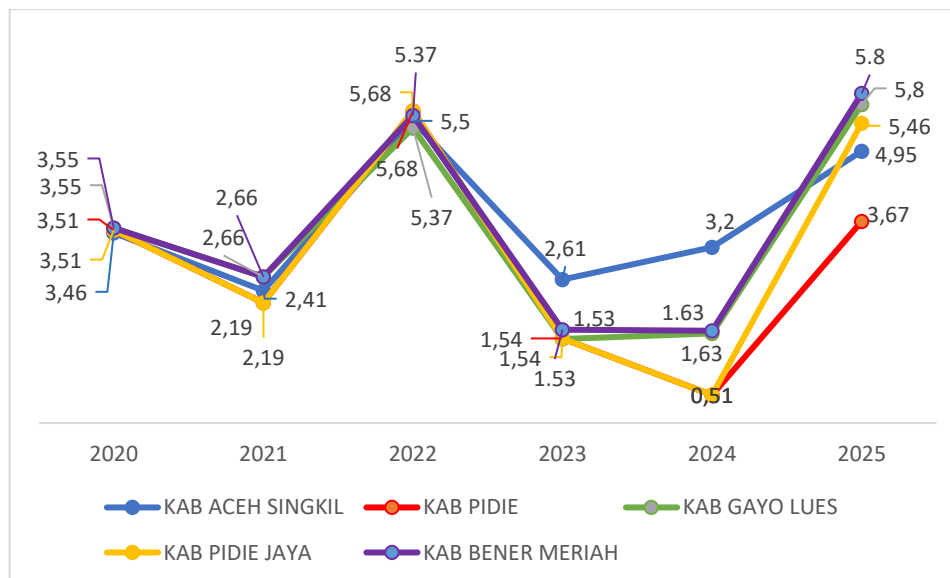
stabilitas ekonomi, menurunkan daya beli masyarakat, dan menimbulkan ketidakpastian dalam keputusan investasi dan konsumsi. Oleh karena itu, fenomena ini sangat penting (Desfitra *et al.*, 2024).

Menurut Achyar & Hakim, (2021), untuk membuat pertumbuhan ekonomi lebih inklusif dan bermanfaat bagi semua orang, pengendalian inflasi sangat penting. Meskipun tingkat inflasi yang tinggi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi yang tinggi akan mengganggu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan berdampak negatif pada keadaan sosial ekonomi masyarakat(Sari *et al.*, 2021).

Fenomena inflasi di Provinsi Aceh dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang signifikan, meskipun secara umum berada dalam kisaran moderat. Inflasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, dan fluktuasi harga energi, yang secara langsung memengaruhi daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah dan menengah (Khaironi, 2021).

Provinsi Aceh memiliki inflasi yang cenderung rendah dibandingkan rata-rata nasional (sekitar 1,8-2,5%) akibat dari ketergantungan yang kuat pada sektor primer yang kurang terpengaruh fluktuasi global, meskipun rentan terhadap lonjakan harga bahan pokok akibat cuaca ekstrem atau bencana alam. Daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi seperti Aceh Singkil, Pidie, Pidie Jaya, Gayo Lues dan Bener Meriah menghadapi inflasi yang lebih tinggi dibanding dengan daerah perkotaan seperti Banda Aceh. Hal ini dikarenakan isolasi geografis yang membatasi akses ke pasokan barang, serta biaya transportasi yang mahal untuk memasok bahan pokok. Berikut Gambar 1.3 perkembangan Inflasi di lima

Kabupaten/Kota termiskin di Provinsi Aceh selama enam tahun terakhir dari tahun 2020 sampai 2025.



Gambar 1.3 Inflasi di 5 Kabupaten/Kota termiskin Provinsi Aceh Tahun 2020-2025 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (2026)

Gambar 1.3 menunjukkan fluktuasi inflasi yang dinamis di lima kabupaten termiskin Provinsi Aceh pada periode 2020-2025, dimana pada tahun 2020 inflasi di kelima kabupaten ini berada pada level moderat di kisaran 3,4% hingga 3,5%. Angka ini mencerminkan kondisi ekonomi di awal pandemi COVID-19, di mana terjadi gangguan pada rantai pasok namun daya beli masyarakat masih tertahan. Pada tahun 2022 seluruh kabupaten mengalami lonjakan inflasi yang signifikan, mencapai titik tertinggi di kisaran 5,3% hingga 5,6%. Lonjakan inflasi yang terjadi pada tahun 2022 ini disebabkan oleh kombinasi faktor global dan domestik. Secara global, konflik Rusia–Ukraina memicu gangguan rantai pasok dan kenaikan harga energi serta pangan dunia, yang berdampak langsung pada kenaikan harga di Indonesia (Iswah & Millatipuan, 2025). Dari sisi domestik, kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi pada tahun 2022 turut mendorong inflasi secara signifikan

karena meningkatkan biaya transportasi dan distribusi barang (Wijaya *et al.*, 2024). Sementara itu penurunan drastis terjadi pada tahun 2023 dan 2024 dimana inflasi menunjukkan tren penurunan, bahkan beberapa daerah menyentuh angka 0,5% ditahun 2024. Hal ini terjadi karena stabilitas harga komoditas, pemulihan rantai pasok, serta kebijakan pengendalian inflasi oleh pemerintah sehingga tekanan inflasi mulai mereda (Naifeto, 2025). Pada tahun 2025 Inflasi melonjak di kelima kabupaten hal ini disebabkan oleh adanya program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyebabkan kenaikan harga bahan pangan, serta gangguan distribusi, dan dampak bencana banjir. Banjir di sejumlah wilayah Aceh pada akhir tahun 2025 menyebabkan jalan terputus, lahan pertanian rusak, serta pasokan beras, cabai, dan sayuran berkurang sehingga harga naik. Bank Indonesia Perwakilan Aceh (2025) menyebut kelompok makanan menjadi penyumbang utama meningkatnya inflasi di sejumlah daerah.

Menurut Achyar & Hakim, (2021) Dampak inflasi terhadap perekonomian Aceh terlihat dalam beberapa aspek. Pertama, inflasi mengikis daya beli masyarakat, terutama di sektor rumah tangga miskin, sehingga konsumsi domestik yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi cenderung menurun. Kedua, ketidakstabilan harga menghambat investasi lokal, karena pelaku usaha menghadapi ketidakpastian biaya produksi dan harga jual. Ketiga, inflasi juga memperkuat ketimpangan ekonomi, karena kelompok berpendapatan tinggi lebih mampu menyesuaikan diri dengan kenaikan harga, sementara kelompok rentan tetap kesulitan, sehingga kesenjangan sosial-ekonomi di Aceh tetap tinggi

Selain Inflasi tingkat pengangguran juga merupakan faktor penting pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Dua indikator makroekonomi, pertumbuhan

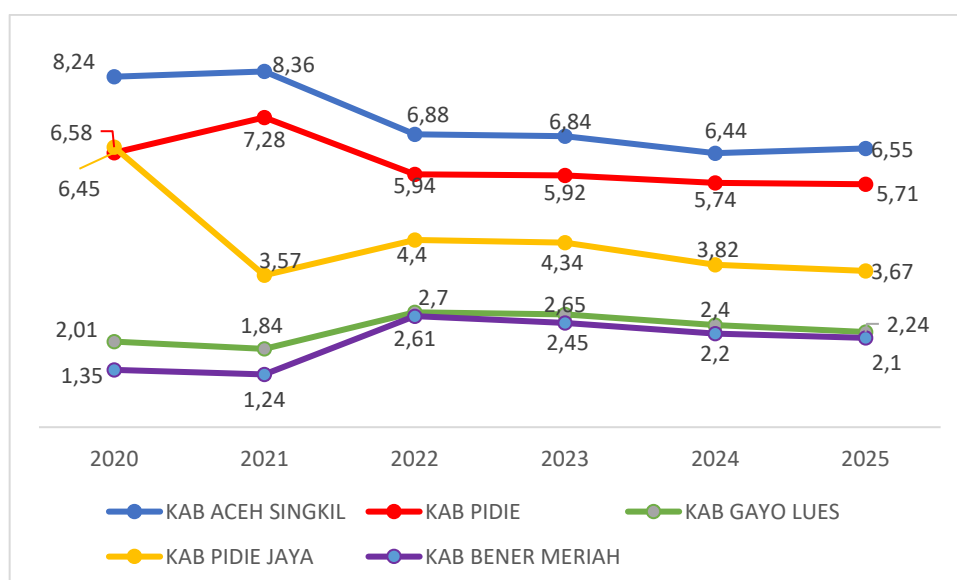
ekonomi dan tingkat pengangguran, berkorelasi erat dengan keadaan ekonomi suatu negara. Menurut konsep Hukum Okun, peningkatan pertumbuhan ekonomi akan mendorong penyerapan tenaga kerja, yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka (Jain & Kumari, 2024). Pengangguran terjadi karena pertumbuhan tenaga kerja lebih besar daripada pertumbuhan lapangan pekerjaan. Pengangguran tinggi merupakan masalah bagi ekonomi negara atau daerah dari perspektif makro (Abrar *et al.*, 2022).

Dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, pengangguran merujuk pada individu yang tergolong kan dalam angkatan kerja, berusia antara 15 sampai 65 tahun, yang secara aktif mencari pekerjaan pada tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Pengangguran mencerminkan sumber daya yang tidak dimanfaatkan. Para pengangguran memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi pada pendapatan nasional, tetapi mereka tidak dapat melakukannya (Sukirno, dalam Pane *et al.*, 2024).

Pengangguran menurut Badan Pusat Statistik (2025) juga dikenal dengan istilah Tingkat Pengangguran Terbuka yaitu mereka yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa sulit untuk mendapatkan pekerjaan, dan yang sudah memiliki pekerjaan tetapi memilih tidak bekerja (menganggur). Oleh karena itu, indikator yang menunjukkan jumlah pengangguran adalah tingkat pengangguran terbuka.

Tingkat Pengangguran di lima kabupaten termiskin di Provinsi Aceh yaitu Aceh Singkil, Pidie, Pidie Jaya, Bener Meriah, dan Gayo Lues umumnya relatif tinggi namun tidak merata antar daerah, dengan beberapa wilayah seperti Aceh

Singkil dan Pidie memiliki tingkat pengangguran lebih tinggi dibandingkan daerah seperti Gayo Lues dan Bener Meriah yang cenderung lebih rendah karena dominasi sektor pertanian yang menyerap tenaga kerja (Abrar *et al.*, 2019). Secara umum, kondisi ini mencerminkan bahwa keterbatasan lapangan kerja formal dan ketergantungan pada sektor primer menjadi faktor utama yang mempengaruhi tingkat pengangguran di wilayah tersebut. Berikut Gambar 1.4 data Tingkat Pengangguran Terbuka di lima Kabupaten/Kota termiskin di Provinsi Aceh tahun 2020-2025.



Gambar 1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka di 5 Kabupaten/Kota termiskin Provinsi Aceh Tahun 2020-2025 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (2026)

Dari Gambar 1.4 terlihat tren penurunan angka pengangguran secara bertahap di sebagian besar kabupaten, meskipun terdapat variasi angka yang cukup lebar antar daerah. Kabupaten Aceh singkil memiliki tingkat pengangguran tertinggi secara konsisten, mencapai puncaknya pada tahun 2021 sebesar 8,35% dan turun ke 6,74% pada tahun 2024. Sedangkan kabupaten dengan tingkat pengangguran terendah dibandingkan kabupaten lain yaitu kabupaten Bener Meriah

dengan angka yang fluktuatif namun stabil di kisaran 1,35% pada tahun 2020 hingga 2,1% pada tahun 2025. Fenomena utama yang terlihat adalah adanya kaitan erat antara penurunan pengangguran dengan pulihnya pertumbuhan ekonomi pasca-pandemi. Pada tahun 2021, saat ekonomi mulai tumbuh positif kembali seperti Aceh singkil yang naik ke 3,9%, angka pengangguran di beberapa daerah masih sempat naik atau bertahan tinggi, hal ini dikarenakan dunia usaha memerlukan waktu untuk melakukan pembukaan lapangan kerja kembali meskipun pertumbuhan ekonomi yang sudah berangsur membaik dan kembali positif.

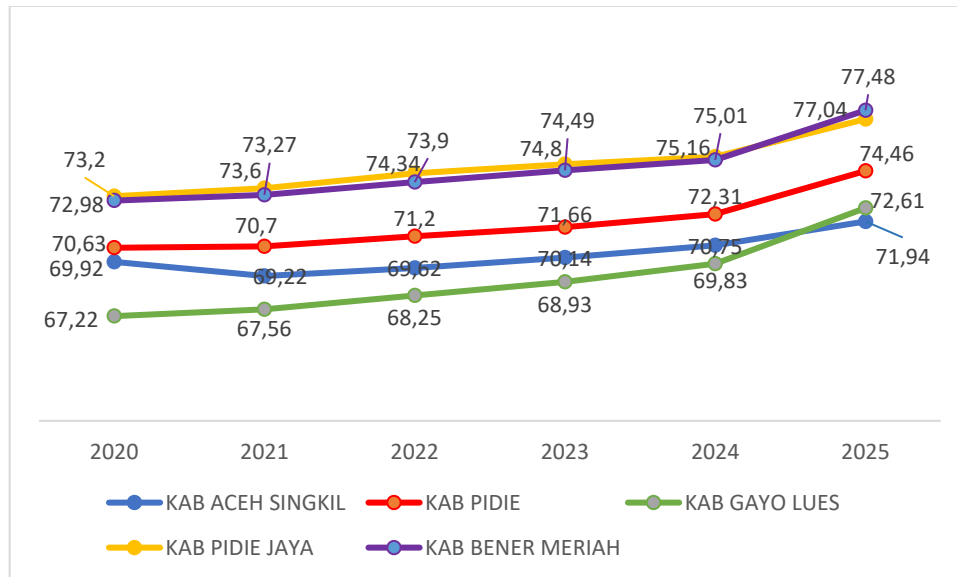
Salah satu permasalahan lainnya yang turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan salah satu tolak ukur yang mencerminkan pembangunan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia mengukur pencapaian pembangunan sosio-ekonomi suatu negara dengan menggabungkan sektor pendidikan, kesehatan dan pendapatan riil per kapita (Arifin & Fadllan, 2021).

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencakup aspek kualitas fisik dan non fisik penduduk. IPM secara fisik tercermin dari harapan hidup dan IPM secara non fisik dilihat dari rata-rata penduduk bersekolah, angka melek huruf dan kemampuan ekonomi. Indeks pembangunan manusia bertujuan untuk memantau kesejahteraan masyarakat. Karena manusia bukan hanya dijadikan sebagai objek pembangunan, tetapi diharapkan dapat menjadi subjek yang dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kemajuan suatu negara.

Sumber daya manusia merupakan aset utama dalam pembangunan suatu bangsa. Masyarakat yang memiliki usia harapan hidup tinggi, kondisi kesehatan

yang baik, serta tingkat pendidikan dan pengetahuan yang memadai akan mampu meningkatkan produktivitas, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan standar hidup yang layak. Tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada suatu wilayah mencerminkan keberhasilan pembangunan manusia yang dilakukan oleh negara atau daerah tersebut. Selain itu, pertumbuhan jumlah penduduk juga dapat meningkatkan ketersediaan tenaga kerja yang berpotensi meningkatkan kapasitas produksi. Kondisi ini pada akhirnya mampu mendorong pertumbuhan perekonomian melalui peningkatan produksi nasional dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan (Sukirno, dalam Arifin & Fadllan, 2021).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di lima kabupaten termiskin di Provinsi Aceh yaitu Aceh Singkil, Pidie, Pidie Jaya, Bener Meriah, dan Gayo Lues, secara umum berada pada kategori menengah ke bawah dan cenderung lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi, dengan beberapa daerah seperti Aceh Singkil dan Gayo Lues menunjukkan perkembangan IPM yang relatif lambat dan tidak konsisten (Nizar *et al.*, 2019). Selain itu, Nurhaila & Anwar, (2024) menegaskan bahwa rendahnya IPM di kabupaten-kabupaten tersebut berkaitan erat dengan tingginya tingkat kemiskinan dan keterbatasan kualitas pendidikan serta kesehatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di wilayah tersebut masih menghadapi tantangan struktural, terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan akses layanan dasar. Berikut ini Gambar 1.5 Indeks Pembangunan Manusia di lima kabupaten/Kota termiskin di Provinsi Aceh sejak enam tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020 sampai 2025.



Gambar 1.5 Indeks Pembangunan Manusia di 5 Kabupaten/Kota termiskin Provinsi Aceh tahun 2020-2025 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (2026)

Gambar 1.5 menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia di lima Kabupaten/Kota termiskin di Provinsi Aceh mengalami peningkatan yang stabil dan konsisten setiap tahunnya, meskipun di tengah guncangan ekonomi pandemi pada awal periode. Pada tahun 2020, kabupaten Pidie dan Pidie Jaya menempati posisi tertinggi dengan angka masing-masing 70,63% dan 73,2%. Tren positif ini berlanjut hingga tahun 2025, di mana seluruh kabupaten mencatat angka tertinggi sepanjang periode tersebut, dengan kabupaten Bener Meriah mencapai angka 77,48% dan kabupaten Pidie Jaya menyusul di angka 77,04%. Sebaliknya Gayo Lues secara konsisten berada pada posisi terendah dibandingkan kabupaten lainnya, meskipun tetap menunjukkan pertumbuhan.

Fenomena utama yang terjadi adalah adanya korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dan IPM, namun dengan kecepatan yang berbeda. Sementara pertumbuhan ekonomi berfluktuasi tajam (terutama saat transisi 2020 ke 2021), kenaikan IPM cenderung bergerak stabil dan linier. Ini menunjukkan bahwa

pertumbuhan ekonomi di daerah termiskin belum secara instan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara signifikan dalam jangka pendek. Pada tahun 2020, saat pertumbuhan ekonomi turun ke angka negatif, IPM justru tidak ikut turun melainkan mengalami kenaikan seperti kabupaten Aceh Singkil yang tetap di angka 69%, Meskipun pertumbuhan ekonomi di lima kabupaten termiskin Aceh telah pulih dari kontraksi -1,16% di tahun 2020 menuju tren positif hingga 4,55% pada 2024.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah termiskin di Provinsi Aceh belum merata dan masih dipengaruhi oleh perbedaan kualitas pembangunan manusia, stabilitas harga, serta tingkat pengangguran. Urgensi utamanya terletak pada fenomena tahun 2022, di mana pertumbuhan ekonomi yang sedang dalam tren pemulihan pasca-pandemi justru dihantam oleh lonjakan inflasi tajam yang mencapai 5,68%. Kondisi ini menciptakan risiko tinggi bagi masyarakat miskin di kabupaten seperti Aceh Singkil dan Gayo Lues, karena kenaikan harga barang pokok yang tidak terkendali dapat menghapus dampak positif dari pertumbuhan ekonomi.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara inflasi, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pertumbuhan ekonomi seperti penelitian Asnidar (2018), Utami (2020), Br Hutabarat *et al.*, (2025), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya variasi temuan dan masih terbukanya ruang kajian yang lebih spesifik, terutama pada wilayah dengan karakteristik kemiskinan ekstrem seperti kabupaten termiskin di Provinsi Aceh. penelitian tersebut belum mampu menangkap perbedaan kondisi antar kabupaten,

padahal kenyataannya terdapat ketimpangan kesejahteraan yang cukup signifikan, termasuk adanya kabupaten yang secara konsisten tergolong termiskin.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, terlihat adanya celah penelitian (*research gap*) yang cukup jelas. Hingga saat ini, belum terdapat penelitian yang secara khusus menganalisis pengaruh inflasi, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten termiskin di Provinsi Aceh. Padahal, kabupaten termiskin memiliki karakteristik ekonomi yang lebih rentan.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada fokusnya yang lebih spesifik dan kontekstual, yaitu menganalisis determinan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten termiskin di Provinsi Aceh dengan menggunakan variabel inflasi, TPT, dan IPM secara simultan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal, sekaligus menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penelitian ini dimaksud untuk mengukur dan menjelaskan bagaimana pengaruh dari inflasi, tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu judul yang diambil dari penelitian ini adalah **“Pengaruh Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/kota Termiskin di Provinsi Aceh”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Termiskin di Provinsi Aceh?
2. Bagaimanakah pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Termiskin di Provinsi Aceh?
3. Bagaimanakah pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Termiskin di Provinsi Aceh?
4. Bagaimanakah pengaruh Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Termiskin di Provinsi Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian, yaitu:

1. Mengetahui pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/kota Termiskin di Provinsi Aceh.
2. Mengetahui pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Termiskin di Provinsi Aceh.
3. Mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Termiskin di Provinsi Aceh.
4. Mengetahui pengaruh Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia, terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Termiskin di Provinsi Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian ilmiah tentunya dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis. Adapun penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat diantara-Nya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang akan di dapatkan pembaca adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi pembangunan dan ekonomi makro yang berkaitan dengan inflasi, pengangguran dan kualitas sumber daya manusia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah serta menjadi tambahan referensi bagi kajian-kajian yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, khususnya pada daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.
- c. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dan membantu bagi aktivitas akademis untuk menambah informasi.
- d. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa sebagai contoh dalam karya ilmiah serta memperluas ilmu pengetahuan, wawasan dan sebagai referensi dari hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka manfaat praktis yang akan di dapatkan pembaca adalah sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, manfaat ini digunakan sebagai sarana untuk berlatih dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai tambahan untuk memperoleh gambaran mengenai inflasi, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, dan pertumbuhan ekonomi serta melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini.
- b. Sebagai tambahan referensi dan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan pengendalian inflasi, penurunan tingkat pengangguran, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia guna mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah miskin.
- c. Bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang cara meningkatkan analisa melalui metode yang dipelajari.